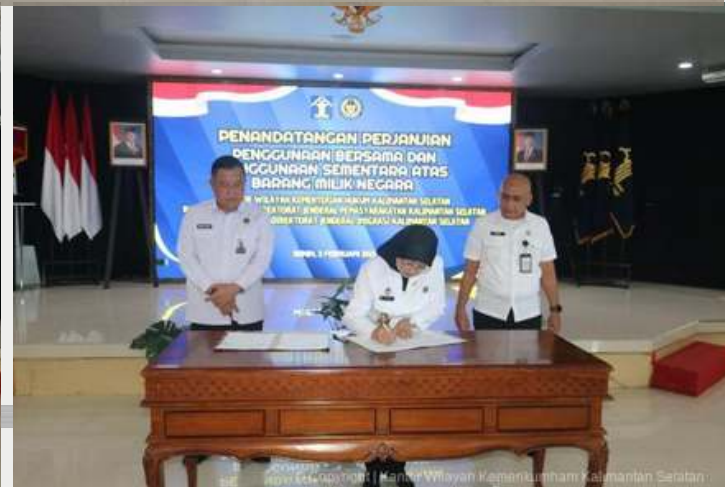




BERGERAK NEWS

BULETIN

MINGGU KE-1 FEBRUARI 2025



**KANWIL KEMENKUM
KALIMANTAN SELATAN**

- PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DAN PEMBINAAN HUKUM
- PELAYANAN HUKUM





HIGHLIGHT

BERGERAK NEWS

07

**KAKANWIL KEMENKUM
KALSEL, NURYANTI
WIDYASTUTI LANTIK
PEJABAT FUNGSIONAL
PENYULUH HUKUM**



12

**ITJEN LAKSANAKAN AUDIT
KETAATAN PENGADAAN BARANG
DAN JASA KONSTRUKSI, KEMENKUM
KALSEL TEGASKAN KOMITMEN
AKUNTABILITAS**

13

**KANTOR WILAYAH KEMENKUM KALSEL
TINGKATKAN PEMAHAMAN KI MELALUI
PROGRAM DJKI GOES TO PESANTREN DI
PONPES DARUL HIJRAH PUTRI**

14

**KANWIL KEMENKUM KALSEL GELAR
TECHNICAL MEETING, BAHAS
STRATEGI PENGUATAN PROGRAM
KEKAYAAN INTELEKTUAL 2025**

20

**KAKANWIL KEMENKUM
KALSEL DORONG UMKM
LOKAL, PERKUAT
PERLINDUNGAN HAK
KEKAYAAN INTELEKTUAL**

22

**SOSIALISASI PERDANA IP CLINIC:
KANWIL KEMENKUM KALSEL
DORONG PERLINDUNGAN
KEKAYAAN INTELEKTUAL DI
KABUPATEN HSS**

25

**EXIT MEETING AUDIT PENGADAAN
KONSTRUKSI: KOMITMEN KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM
KALIMANTAN SELATAN
TERHADAP KEPATUHAN REGULASI**

09



**KANWIL KEMENKUM
KALSEL GELAR
PENANDATANGAN
PERJANJIAN
PEMANFAATAN BMN
BERSAMA**

23



**KANWIL KEMENKUM
KALSEL GELAR
RAPAT EFISIENSI
ANGGARAN,
PASTIKAN
PELAYANAN HUKUM
TETAP OPTIMAL**



kemenkumkalsel

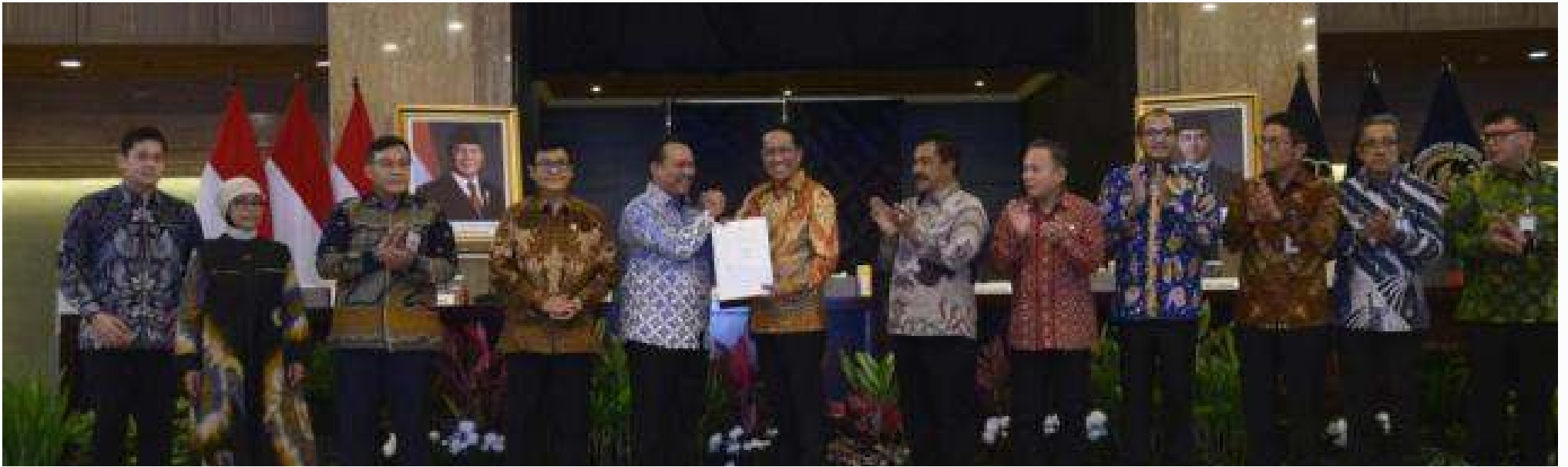


kumham_kalsel



kalsel.kemenkum.go.id

BPK Nilai Kemenkumham Ideal Dalam Pengelolaan Anggaran



Jakarta - Menteri Hukum (Menkum) Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa tata kelola keuangan yang berkualitas tetap menjadi prioritas di masa transisi. Langkah ini diambil sebagai bentuk pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

"Dalam masa transisi ini, komitmen kami terhadap tata kelola keuangan yang berkualitas tetap menjadi prioritas," ujar Supratman di kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Tahun 2024 di Graha Pengayoman, Jumat (31/01/2025).

Pada proses penyusunan laporan keuangan ini, Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasaran (sebelumnya Kemenkumham) yang masih mengelola anggaran atau DIPA Kemenkumham wajib menyusun laporan keuangan tahun 2024 dan akan dikonsolidasikan oleh Kementerian Hukum selaku kementerian pengampu.

Menkum juga meminta dukungan dari seluruh satuan kerja untuk bersinergi dan bersikap kooperatif selama proses pemeriksaan agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

"Berdasarkan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI sampai dengan semester I tahun 2024, persentase tindak lanjut yang telah sesuai rekomendasi sebesar 90,38 persen. Ini menunjukkan komitmen kami dalam menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan BPK," kata pria asal Sulawesi ini.

Sementara itu, Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan Negara 1, Nyoman Adhi Suryadnyana, berujar bahwa Kemenkumham adalah salah satu kementerian yang ideal dalam pengelolaan anggaran. Pengelolaan keuangan yang baik berdampak pada pengelolaan organisasi Kemenkumham secara menyeluruh.

Kegiatan Entry Meeting ini dihadiri oleh pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, Tim Pemeriksa BPK RI, dan sejumlah Kepala Kantor Wilayah Kemenkum dan Kemenimipis, beserta Kepala Divisi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis yang hadir secara virtual. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti, turut menanggapi kebijakan ini dengan optimisme. Ia menegaskan bahwa Kanwil Kemenkumham Kalsel akan terus menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, sejalan dengan arahan Menkum.



Pemerintah dan DPR Sepakat RUU BUMN Masuk Rapat Paripurna



Jakarta – Pemerintah dan DPR RI sepakat agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dibahas lebih lanjut dalam Rapat Tingkat II, yakni Rapat Paripurna DPR RI. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Ermarini saat memimpin Rapat Kerja Tingkat I Komisi VI DPR RI.

"Setelah menerima, mendengarkan, dan melihat pendapat akhir fraksi-fraksi, maka dapat kami simpulkan, maka dari kedelapan fraksi di Komisi VI DPR RI telah menyetujui RUU Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN untuk selanjutnya dibawa pada pembicaraan tingkat II, dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi Undang-Undang," ujar Anggia.

Mewakili Pemerintah, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas menyampaikan, bahwa Pemerintah mendukung RUU BUMN untuk dibahas lebih lanjut dalam Rapat Paripurna.

Supratman mengatakan, RUU BUMN ini dibuat untuk mendukung visi dan arah kebijakan pemerintah terkait BUMN dalam rangka mewujudkan Indonesia yang maju dan berdaya saing global.

Lebih lanjut Menkum menyampaikan, dalam asta cita yang telah dicanangkan, Pemerintah berkomitmen untuk mendorong hilirisasi sumber daya alam guna meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional.

lam penciptaan nilai melalui hilirisasi, BUMN juga diharapkan dapat menjadi agen pembangunan nasional dengan melakukan beberapa hal yang dapat memberikan kontribusi fiskal penerimaan negara melalui deviden dan pajak.

Selain Menteri Hukum, Rapat Kerja Tingkat I Komisi VI DPR RI ini juga dihadiri oleh perwakilan pemerintah dari Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan dan Kementerian Sekretaris Negara. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti, turut menyambut baik kesepakatan antara Pemerintah dan DPR RI terkait pembahasan lebih lanjut RUU BUMN dalam Rapat Paripurna. Menurutnya, langkah ini merupakan bukti komitmen bersama dalam memperkuat peran BUMN sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional.

"Hilirisasi yang disebutkan dalam pembahasan RUU ini tentu juga relevan bagi daerah-daerah penghasil sumber daya alam, seperti Kalimantan Selatan. Dengan kebijakan yang tepat, kita dapat mengoptimalkan potensi lokal untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional," tambahnya.



Kanwil Kemenkum Kalsel Ikuti Apel Pagi Bersama, Simak dan Komitmen Laksanakan Arahan Wamenkum untuk Sinergi dan Kinerja Optimal

Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti Apel Pagi bersama, Senin (03/02) bertempat di Balai Pertemuan Garuda yang secara terpusat dilaksanakan di Lapangan Merah, bertindak sebagai Pembina Apel Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej. Apel Pagi bersama bukan hanya sekedar rutinitas seremonial, tetapi sebagai ajang silaturahmi, berbagi informasi strategis serta membangun sinergi yang lebih erat ditengah dinamika perubahan kelembagaan yang masih berlangsung hingga saat ini.

Hadir dalam kegiatan, Kepala Kanwil Kemenkum Kalsel, Nuryanti Widyastuti; Kepala Kanwil Ditjen Pemasarakatan Kalimantan Selatan, Mulyadi; Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Kalimantan Selatan, Yan Wely Wiguna, Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH), Anton Edward Wardhana; Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah beserta seluruh jajaran.

Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej mengajak seluruh jajaran untuk berbagi informasi serta membangun sinergi yang lebih erat.

“Sinergi yang baik, akan memastikan kelangsungan program kerja yang berkesinambungan. Adaptif terhadap perubahan regulasi, dan mampu mendukung visi besar kita menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Wamenkum.

Eddy juga menyampaikan bahwa salah satu agenda penting yang mendapat perhatian adalah sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu, dimana UU ini akan mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Proses implementasinya tidak akan mudah, karena perubahan besar ini membawa pembaruan dalam sistem hukum kita yang menjadi langkah penting dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan dalam menciptakan negara yang lebih adil, beradab, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Wamenkum menyoroti pula terkait tantangan efisiensi anggaran di tahun 2025 dan mengingatkan seluruh jajaran untuk tetap fokus pada pencapaian target kinerja.

"Dalam kondisi anggaran yang terbatas, kita dituntut untuk lebih kreatif dan efisien dalam menjalankan tugas. Kualitas kinerja bukan hanya ditentukan oleh jumlah anggaran yang tersedia, tetapi oleh bagaimana kita memaksimalkan sumber daya yang ada, bekerja dengan lebih cerdas, dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang kita ambil tetap memberikan hasil yang optimal meski dengan sumber daya yang terbatas," jelasnya. (Humas Kanwil Kalsel, Dicky/Iwan, Ed : Eko).



Kanwil Kemenkum Kalsel Terima Kunjungan DPRD Kota Banjarbaru Bahas Optimalisasi Harmonisasi Ranperda



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) menerima kunjungan Pimpinan, Anggota dan unsur kelengkapan DPRD Kota Banjarbaru dalam rangka koordinasi serta konsultasi terkait kerja sama dalam pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD Kota Banjarbaru. Kegiatan ini berlangsung di Balai Pertemuan Garuda pada Senin, 3 Februari 2025.

Kunjungan tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Nuryanti Widyastuti, serta jajaran pejabat Kanwil, termasuk Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Anton Edward Wardhana dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum Meidy Firmansyah. Dari pihak DPRD Kota Banjarbaru, turut hadir Wakil Ketua I DPRD Neni Hendryawati, Wakil Ketua II DPRD Windi Novianto, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Hinder Wahyudin, serta anggota DPRD lainnya dan perwakilan Sekretariat DPRD.

Dalam pertemuan ini, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel membuka kegiatan dengan menyampaikan pengenalan tugas dan fungsi Kanwil, khususnya dalam aspek harmonisasi regulasi daerah. Pertemuan ini menjadi wadah diskusi antara DPRD Kota Banjarbaru dan jajaran Kanwil Kemenkum Kalsel untuk membahas mekanisme harmonisasi Ranperda yang akan diusulkan.



Ketua Bapemperda Kota Banjarbaru menyampaikan bahwa pada tahun 2024, DPRD telah melakukan harmonisasi terhadap beberapa Ranperda. Untuk tahun 2025, DPRD Kota Banjarbaru menargetkan pembahasan 13 Ranperda, yang terdiri dari 3 Ranperda inisiatif DPRD, 7 Ranperda inisiatif Pemerintah Kota Banjarbaru, serta 6 Ranperda inisiatif dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). DPRD berharap adanya kerja sama yang lebih optimal dengan Kanwil Kemenkum Kalsel guna mempercepat proses harmonisasi, mengingat Pemerintah Kota Banjarbaru melalui Bagian Hukum masih mengalami kendala dalam pelaksanaan harmonisasi akibat keterbatasan SDM, waktu maupun anggaran.

Menanggapi hal tersebut, Kakanwil Kemenkum Kalsel, Nuryanti Widyastuti, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen penuh dalam mendukung harmonisasi Ranperda dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Raperkada). Ia menekankan bahwa seluruh regulasi daerah wajib melalui proses harmonisasi di Kanwil Kemenkum Kalsel sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jajarannya juga siap memberikan pendampingan dalam proses tersebut agar berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. (Humas Kanwil Kemenkum, Teks dan Foto: Joel, Ed: Eko)



Kakanwil Kemenkum Kalsel, Nuryanti Widyastuti Lantik Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum



Banjarماسin – Humas_ Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menggelar Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Nonmanajerial pada Senin, (03/02). Acara yang berlangsung di Ruang Balai Pertemuan Garuda ini dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Nuryanti Widyastuti, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, serta Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah. Turut hadir pula para pejabat manajerial di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan.

Dalam sambutannya, Kakanwil menekankan pentingnya peran pejabat fungsional penyuluh hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum di tengah masyarakat.

“Melalui pelantikan ini, para pemangku jabatan fungsional penyuluh hukum diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam menyebar-luaskan informasi serta norma hukum dan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Nuryanti juga menegaskan bahwa tugas penyuluh hukum bukan hanya sekadar menyampaikan informasi hukum, tetapi juga membangun pemahaman yang kuat di masyarakat agar lebih taat hukum dan sadar akan hak serta kewajiban mereka.

Adapun pejabat yang dilantik dalam kesempatan ini adalah Hesnaningtyas Putria, Togi Leonardo Situmorang, dan Tutus Bahtiar, yang resmi menjabat sebagai Penyuluh Hukum Ahli Pertama. Dengan pelantikan ini, mereka diharapkan dapat segera menjalankan tugasnya secara profesional dan berintegritas dalam mendukung visi Kementerian Hukum untuk meningkatkan kualitas layanan hukum kepada masyarakat. Acara ditutup dengan pemberian ucapan selamat dari para pejabat yang hadir, sebagai bentuk dukungan atas amanah baru yang diemban oleh para pejabat fungsional yang telah dilantik. (foto : Joel, teks : Pendi, ed : Eko)



Pastikan Profesionalisme dan Keberlanjutan Pelayanan, Kanwil Hukum Kalsel Laksanakan Pelantikan Notaris Pengganti Kota Banjarmasin dan Kab. Tabalong



Banjarmasin, AHU_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menggelar pelantikan notaris pengganti pada Senin (03/02) untuk Kota Banjarmasin dan Kabupaten Tabalong. Pelantikan ini dilaksanakan sebagai amanah Undang-Undang, yang mengatur bahwa selama masa cuti, notaris dilarang melakukan praktik kenotariatan dan harus menunjuk notaris pengganti selama masa cuti.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah, serta Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana. Adapun Notaris yang dilantik adalah Erwan Fitriady sebagai notaris Kabupaten Tabalong dan Annastasya Nestiti Putri sebagai notaris pengganti Kota Banjarmasin. Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Nuryanti Widyastuti, menekankan pentingnya peran notaris pengganti dalam memastikan kelancaran layanan kenotariatan selama notaris utama menjalani cuti.



“Kami berharap notaris pengganti dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme. Keberadaan notaris pengganti sangat penting untuk menjaga keberlangsungan layanan kenotariatan di masyarakat,” ujar Kakanwil.

Lebih lanjut, Nuryanti Widyastuti berpesan kepada seluruh notaris untuk terus menjaga komunikasi dengan Kanwil Kemenkum Kalsel. Jika ada kendala atau permasalahan dalam pelaksanaan tugas, ia menegaskan agar segera berkoordinasi demi memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Pelantikan ini merupakan bagian dari komitmen Kanwil Kemenkum Kalsel dalam menjaga profesionalisme dan kelancaran pelayanan hukum di wilayah Kalimantan Selatan. Dengan adanya notaris pengganti, diharapkan masyarakat tetap dapat memperoleh layanan kenotariatan dengan baik meskipun notaris utama berhalangan sementara. (Humas Kanwil Kalsel, teks dan foto : Mahdian ed : Eko)

Kanwil Kemenkum Kalsel Gelar Penandatanganan Perjanjian Pemanfaatan BMN Bersama

Banjarmasin, Humas_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) menggelar acara penandatanganan perjanjian penggunaan bersama dan penggunaan sementara atas Barang Milik Negara (BMN). Acara ini melibatkan Kanwil Kemenkum Kalsel, Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalsel, dan Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Kalsel.

Acara yang berlangsung di Balai Pertemuan Garuda Kantor Wilayah pada Senin, (03/02/2025) ini dihadiri oleh Kepala Kanwil Kemenkum Kalsel, Nuryanti Widyastuti, Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Kalsel, Mulyadi, Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Kalsel, Yan Wely Wiguna, beserta Kepala Divisi PP & PH, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Pejabat Struktural, serta perwakilan JFT & JFU.

Penandatanganan perjanjian ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Kementerian Hukum Republik Indonesia Nomor SEK-1.OT.01.01 Tahun 2025 yang mengatur masa transisi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024. Selain itu, penandatanganan ini juga menindaklanjuti Surat Edaran Bersama Kementerian Hukum dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan nomor SEK-1.PB.01.01 Tahun 2025 dan SEK-PB.03.01-1 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Barang Milik Negara pada Masa Transisi di Lingkungan Kantor Wilayah.

Dengan adanya perjanjian ini, diharapkan pengelolaan BMN dan penggunaan BMN bersama di lingkungan Kanwil Kalsel dapat berjalan lebih efektif dan efisien, terutama dalam masa transisi ini. (Humas Kemenkum Kalsel, ed: Eko/Arie)



Kemenkum Kalsel Ikuti Technical Meeting Sayembara Aransemen Mars Kekayaan Intelektual



Banjarmasin, KI_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti Technical Meeting Sayembara Aransemen Lagu "Mars" Kekayaan Intelektual Indonesia Berbasis Musik Tradisi Nusantara bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Senin (03/02/2025).

Kegiatan secara virtual ini diikuti langsung oleh Meidy Firmansyah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, dan dihadiri oleh Riswandi, Kepala Bidang Pelayanan KI, bersama tim Pelayanan Kekayaan Intelektual Eka Santhy Maulina, Ida Elsha Nastiti, Mirna, Alifian Galuh.

Sayembara ini bertujuan untuk mendorong kreativitas Kanwil Kementerian Hukum dalam mengaransemen ulang Mars KI Indonesia dengan sentuhan musik tradisional Nusantara. Selain itu, kompetisi ini juga merupakan bagian dari program Tahun Tematik Hak Cipta dan Desain Industri yang dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkum RI.

Dalam pelaksanaannya, sayembara ini mengusung beberapa tujuan utama, yakni:

1. Menggali potensi dan kreativitas Kanwil Kemenkumham dalam seni musik.
2. Melestarikan dan mempromosikan musik tradisional Nusantara.
3. Menyebarkan Mars KI Indonesia sebagai bagian dari identitas lembaga.
4. Memupuk rasa cinta terhadap budaya lokal melalui karya musik.

Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi wadah apresiasi terhadap kekayaan budaya Indonesia serta memperkenalkan Mars KI Indonesia dalam berbagai warna musik daerah. Hasil dari technical meeting ini akan dilaporkan kepada pimpinan sebagai bahan evaluasi lebih lanjut. (Kontributor, ed: Eko/Arie)



“Kerja Bersama Mempertahankan Opini WTP” Kanwil Kemenkum Kalsel Ikuti Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan BMN Tahun 2024



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti secara virtual kegiatan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024 Tingkat Kantor Wilayah dengan “Kerja Bersama Mempertahankan Opini WTP” pada Selasa (04/02).

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah, Nuryanti Widyastuti beserta jajaran pengelola keuangan dan BMN secara virtual. Dalam laporan panitia penyelenggara, yang disampaikan Kepala Biro Keuangan Kementerian Hukum, Sri Yusfina Yusuf disampaikan bahwa tujuan utama kegiatan ini adalah memastikan penyajian laporan keuangan dan BMN yang akurat, transparan, serta akuntabel di tingkat Kantor Wilayah. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Kemenkumham serta memastikan kelancaran proses transisi keuangan dan BMN.

Kemudian dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta mengingatkan seluruh satuan kerja bahwa masih terdapat tugas yang harus diselesaikan dalam laporan keuangan tahun 2024.

“Kegiatan ini merupakan sinergi kita bersama dan langkah strategis untuk memastikan proses transisi tidak mengganggu kualitas tata kelola keuangan dan BMN dengan tetap menjaga akurasi dan keandalan data laporan keuangan dan BMN dengan mengutamakan prinsip akuntabilitas dan transparansi.” sebut Nico Afinta.

Kegiatan ini diharapkan dapat membawa manfaat besar bagi terwujudnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan BMN. Selain itu, hasil dari kegiatan ini diharapkan memberikan dampak positif dalam mendukung kelancaran proses transisi keuangan dan BMN pada Kemenkumham.

Setelah sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi panel bersama narasumber dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan yang akan memberikan pemaparan dan diskusi panel dalam kegiatan yang berlangsung pada 4-7 Februari 2025. (Humas Kanwil Kalsel, teks dan foto : Mahdian ed : Eko)

Itjen Laksanakan Audit Ketaatan Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi, Kemenkum Kalsel Tegaskan Komitmen Akuntabilitas



Banjarmasin, Humas_Info – Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia melaksanakan kegiatan Audit Ketaatan atas Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024. Audit ini bertujuan untuk memastikan akuntabilitas dan kepatuhan dalam proses pengadaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kegiatan ini dipimpin oleh Inspektur Wilayah V, Amrizar, yang bertindak sebagai Penanggung Jawab, serta dilaksanakan oleh Tim Auditor Inspektorat Jenderal. Kedatangan tim audit disambut oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH), Anton Edward Wardhana, didampingi Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Rustam Sakka.

"Kami menyambut baik kegiatan audit ini sebagai upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa," ujar Anton Edward Wardhana.

Audit ini akan berlangsung selama sembilan hari kalender, terhitung sejak 30 Januari hingga 7 Februari 2025. Selama pelaksanaan audit, tim akan melakukan pemeriksaan serta evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa konstruksi yang telah dilakukan oleh Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel. "Kami berharap audit ini dapat memberikan rekomendasi konstruktif untuk perbaikan ke depan," ucap Kepala Divisi PPPH.

Dalam kesempatan ini, dilakukan pula diskusi mendalam terkait berbagai aspek kepatuhan dalam pengadaan barang dan jasa konstruksi. Inspektur Wilayah V, Amrizar, menegaskan bahwa audit ini merupakan bagian dari upaya pengawasan internal guna memastikan bahwa setiap proses pengadaan berjalan sesuai regulasi yang berlaku.

Pelaksanaan audit ketaatan atas pengadaan barang dan jasa konstruksi di Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel berjalan lancar sesuai dengan rencana. Selama proses audit, tim Inspektorat Jenderal melakukan pemeriksaan secara mendalam dan berdiskusi dengan jajaran terkait guna memastikan seluruh tahapan pengadaan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk komitmen dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas, serta mendorong perbaikan tata kelola pengadaan agar semakin efektif dan efisien. (Humas Kanwil Kemenkum Kalsel, Teks dan Foto: Joel, Ed: Eko)



Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel Tingkatkan Pemahaman KI Melalui Program DJKI Goes to Pesantren di Ponpes Darul Hijrah Putri



Banjar, KI_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Kalimantan Selatan menyelenggarakan audiensi dan sosialisasi program DJKI Goes to Pesantren di Pondok Pesantren (Ponpes) Darul Hijrah Putri, Banjar. Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda prioritas Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) tahun 2025 untuk meningkatkan literasi Kekayaan Intelektual (KI), khususnya hak cipta dan desain industri di lingkungan pesantren.

Audiensi dihadiri oleh perwakilan Kanwil Kemenkum Kalsel yang dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah, Nuryanti Widyastuti, beserta jajarannya, termasuk Meidy Firmansyah (Kepala Divisi Pelayanan Hukum), dan Riswandi (Kepala Bidang Pelayanan Hukum). Sementara dari pihak Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri, hadir Ketua Yayasan Dr. H. Abdul Karim, SH, M.Ikom., Wakil Pimpinan Pondok Abdullah Husin, serta perangkat pengurus lainnya seperti Bendahara Yayasan H. Hendro Effendy, Sekretaris Pondok Muhammad Firdausi Nuzula, dan Sekretaris Yayasan Agus Syahrianto.

Dalam pemaparannya, Nuryanti Widyastuti menegaskan pentingnya membangun kesadaran tentang KI di kalangan santri dan pengurus pesantren.

Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri telah menunjukkan komitmen nyata dengan mendaftarkan 10 merek dagang untuk produk makanan hasil produksi santri. Abdul Karim menyatakan apresiasinya terhadap kolaborasi ini.

"Kami berterima kasih atas pendampingan hukum dari DJKI. Ke depan, diharapkan santri dapat lebih kreatif dengan menjadikan KI sebagai landasan dalam berkarya dan berwirausaha," ucapnya.

Kegiatan ini juga mengangkat tema tahunan DJKI 2025 yang berfokus pada optimalisasi hak cipta dan desain industri. Melalui sesi diskusi, tim Kanwil Kemenkum Kalsel memberikan pemahaman praktis mengenai prosedur pendaftaran merek, perlindungan karya kreatif, serta langkah pencegahan pelanggaran KI.

Program DJKI Goes to Pesantren diharapkan menjadi langkah strategis untuk memperluas sosialisasi KI hingga ke wilayah pedalaman. Sinergi antara instansi pemerintah dan pesantren ini diyakini dapat memperkuat daya saing produk lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kreativitas dan orisinalitas.

Kanwil Kemenkum Kalsel berkomitmen melanjutkan pendampingan teknis dan hukum guna mendorong peran aktif Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri dan lembaga pendidikan serupa dalam membangun ekosistem KI yang berkelanjutan. (Humas Kemenkum Kalsel, kontributor: Bidang KI, ed: Eko, Iwan).



Kanwil Kemenkum Kalsel Gelar Technical Meeting, Bahas Strategi Penguatan Program Kekayaan Intelektual 2025

Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Selatan menggelar Technical Meeting untuk membahas strategi dan usulan kegiatan pendukung kinerja Program Kekayaan Intelektual (KI) tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung pada Selasa (04/02) pukul 14.30 WITA di Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Selatan dan dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kepala Bidang Pelayanan KI, serta pejabat fungsional umum (JFU) dan pejabat fungsional tertentu (JFT) di bidang pelayanan KI, termasuk tim Helpdesk Pelayanan KI.

Technical Meeting ini membahas dua program utama sebagai upaya meningkatkan efektivitas pelayanan dan perlindungan Kekayaan Intelektual di Kalimantan Selatan:

1. Catur Program Unggulan:

Jelajah Kekayaan Intelektual Indonesia – Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya KI.

Kawasan Berbasis KI – Mendorong pengembangan wilayah berbasis kekayaan intelektual.

Klinik KI Bergerak (KKIB) – Memfasilitasi layanan KI secara mobile untuk menjangkau masyarakat lebih luas.

Akselerasi Penyelesaian Permohonan KI – Mempercepat penyelesaian permohonan merek, desain industri, dan paten sederhana.

2. Catur Program Prioritas:

Penegakan Hukum KI – Memastikan kepatuhan hukum terkait KI di berbagai sektor.

Peningkatan Permohonan KI – Melalui sosialisasi, edukasi, dan diseminasi.

Pengembangan Kompetensi SDM – Meningkatkan kapasitas aparatur DJKI.

Transformasi Layanan KI Digital – Digitalisasi layanan untuk efisiensi dan transparansi.

Selain program utama tersebut, enam target kinerja utama yang diusulkan dalam kegiatan ini meliputi:

Pengembangan kawasan berbasis kekayaan intelektual (Kawasan Karya Cipta dan/atau Kawasan Desain Industri).

Partisipasi aktif dalam pameran kekayaan intelektual.

Sertifikasi dan re-sertifikasi pusat perbelanjaan berbasis KI.

Peningkatan dan pemanfaatan indikasi geografis.

Mendorong daya saing produk unggulan daerah melalui permohonan merek.

Mendorong peningkatan permohonan paten di daerah.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Selatan, Nuryati Widyastuti, menegaskan pentingnya perencanaan yang matang untuk menghadapi masa transisi dan efisiensi anggaran di tahun ini.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, hasil koordinasi akan dilaporkan kepada pimpinan untuk mendapatkan arahan lebih lanjut. Selain itu, publikasi juga akan diperkuat guna menyebarluaskan informasi terkait rencana dan target kinerja Program KI tahun 2025 kepada masyarakat luas. Diharapkan, melalui program ini, Kalimantan Selatan dapat semakin maju dalam perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual, serta menciptakan ekosistem yang kondusif bagi para inovator dan pelaku usaha di daerah. (Humas Kemenkum Kalsel, Kontributor : Bidang KI, ed: Eko)





Kemenkum Kalsel Perkuat Sinergi dengan Kabupaten Tapin untuk Pemajuan Kekayaan Intelektual



Tapin, KI_ Info - Selasa, (4/2/2025) Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Kalimantan Selatan menyelenggarakan audiensi strategis dalam rangka pemajuan dan penguatan ekosistem kekayaan intelektual (KI) di Kabupaten Tapin. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pimpinan Kanwil Kemenkum Kalsel serta perwakilan Pemerintah Kabupaten Tapin guna membahas kolaborasi konkret dalam meningkatkan perlindungan dan pemanfaatan KI di wilayah setempat.

Audiensi dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Nuryanti Widyastuti didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Riswandi, serta Tim Layanan KI. Dari pihak Pemerintah Kabupaten Tapin, hadir H. Zainal Abidin (Asisten Pemerintahan dan Kesra), Achmad Ramadhan (Kepala Bagian Hukum), dan sejumlah perwakilan tim terkait.

Dalam sambutannya, Nuryanti Widyastuti menegaskan komitmen Kemenkum Kalsel dalam mendukung pemerintah daerah melalui program-program unggulan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah, memaparkan program prioritas DJKI 2025, termasuk “Jelajah Kekayaan Intelektual” yang bertujuan meningkatkan literasi KI di masyarakat, serta “Akselerasi Penyelesaian Permohonan KI” dan “Mobile IP Clinic” untuk mempermudah akses pendaftaran dan konsultasi KI.

Sementara itu, H. Zainal Abidin mewakili Pemerintah Kabupaten Tapin menyampaikan apresiasi atas inisiatif Kemenkum Kalsel.

“Kami siap bersinergi untuk mengoptimalkan potensi lokal, terutama di sektor kuliner, kerajinan, dan produk unggulan lainnya yang telah menjadi identitas Tapin. Dukungan pendampingan hukum dan teknis dari Kemenkum sangat kami butuhkan,” ungkapnya.

Kegiatan ini juga menjadi wadah diskusi terkait tantangan dan strategi pengembangan KI di Kabupaten Tapin. Kepala Bidang Pelayanan KI, Riswandi, menekankan pentingnya pendataan dan registrasi karya inovatif.

Melalui audiensi ini, Kemenkum Kalsel berkomitmen untuk terus memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah, termasuk pelaksanaan pelatihan, sosialisasi door-to-door, serta pendampingan intensif bagi pelaku usaha dan komunitas kreatif. Langkah ini diharapkan dapat menempatkan Kabupaten Tapin sebagai contoh pengelolaan KI yang efektif di tingkat regional. (Humas Kemenkum Kalsel, kontributor: Bidang KI, ed: Eko, Joel)



Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik Tahun 2024: Upaya Meningkatkan Kualitas Layanan Kemenkum Kalsel



Banjarmasin, Humas_ Info – Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menggelar kegiatan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik Tahun 2024 yang dilaksanakan pada Selasa, (04/02/2025) di Ruang BerAkhlaq Kantor Wilayah.

Acara ini melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk Analis SDM Aparatur Ahli Madya, Eko Herdianto, Analis SDM Aparatur Ahli Muda, Slamet Riady, Analis Anggaran Ahli Muda, Ahmad Zubaidi, perwakilan Bidang Pelayanan AHU, serta Tim Sub Bagian Program dan Pelaporan.

Rendahnya kepatuhan terhadap standar pelayanan publik dapat menyebabkan berbagai bentuk maladministrasi, seperti penundaan pelayanan yang berlarut-larut, permintaan imbalan yang tidak sah, penyimpangan prosedur, serta penyalahgunaan wewenang. Dampak dari rendahnya kepatuhan ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat dalam bentuk layanan yang buruk, tetapi juga berpengaruh pada perekonomian, menciptakan biaya ekonomi tinggi dan menghambat pertumbuhan investasi. Sehingga pentingnya kepatuhan instansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pada pembahasan dalam evaluasi penilaian kepatuhan tahun 2024, beberapa poin utama yang menjadi fokus adalah:

- Peningkatan Kompetensi Pelaksana

Pegawai pelayanan publik perlu memiliki pengetahuan yang lebih mendalam tentang Ombudsman RI, komponen standar pelayanan, bentuk-bentuk maladministrasi, serta layanan yang ramah bagi kelompok marginal dan rentan.

- Ketersediaan Fasilitas Pendukung

Seperti pelayanan khusus, publikasi maklumat layanan, dan moto layanan yang jelas serta mudah diakses oleh masyarakat.

- Peningkatan Pengelolaan Pengaduan

Penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan pembinaan terhadap pengelola pengaduan dan memastikan adanya mekanisme yang transparan serta efektif dalam menyelesaikan keluhan masyarakat.

Untuk mengoptimalkan pengelolaan pengaduan, beberapa aspek yang menjadi perhatian utama meliputi:

- Komitmen pimpinan dalam mendukung pengelolaan pengaduan yang efektif.
- Mekanisme pengelolaan pengaduan yang jelas dan mudah diakses.
- Landasan hukum yang kuat untuk menjamin keberlanjutan sistem pengaduan.
- Monitoring dan evaluasi (Monev) yang dilakukan secara berkala.
- Penerapan sistem reward and punishment guna meningkatkan kinerja layanan.
- Kompetensi SDM yang memadai dalam menangani pengaduan.
- Penyediaan sarana dan prasarana untuk pengelolaan pengaduan.



Kemenkum Kalsel Bersama Pemkab HSU, Lakukan Harmonisasi Bahas Raperda Penyertaan Modal Perseroda PT. Tirta Agung Amuntai



Banjarmasin, Humas_ Info – Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kemenkum Kalsel) gelar rapat harmonisasi Raperda, Rabu (05/02) bertempat di Balai Pertemuan Garuda. Kegiatan sebagai tindak lanjut dari Surat Pj. Bupati Hulu Sungai Utara Nomor:100.3.2/262/KUM tanggal 30 Desember 2024 perihal Permohonan Pengharmonisasian atas Raperda Kab. Hulu Sungai Utara.

Rapat dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH), Anton Edward Wardhana membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara berupa Aset/Barang Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum PT. Tirta Agung Amuntai (Perseroda).

Anton Edward Wardhana menyampaikan bahwa Rapat harmonisasi ini untuk memberikan saran dan tanggapan atas Raperda yang diajukan.

“Harmonisasi raperda melibatkan analisis hukum dalam prosesnya, sehingga dengan kolaborasi bersama dengan tim Perancang Peraturan Perundang-undangan, akan memberikan Analisa yang tajam atas dampak yang nantinya ditimbulkan dari Raperda tersebut sehingga dapat menghasilkan produk hukum yang berkualitas,” jelas Anton.

Dilanjutkan dengan pembahasan pasal demi pasal dan tanggapan yang diberikan oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Kemenkum Kalsel. Hadir dalam kegiatan, Kepala Bagian Hukum, Rusni, Kepala Bidang Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten HSU, Abraham, Kepala Bidang Aset BPKAD Kabupaten HSU, Agus Mustafa beserta jajaran terkait. (Humas Kanwil Kalsel, Iwan, Ed : Eko).



Kanwil Kemenkum Kalsel Terima Audiensi Pemkab Balangan, Bahas Harmonisasi Raperda untuk Kepastian Hukum

Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menerima audiensi dari jajaran Pemerintah Kabupaten Balangan dalam rangka proses harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) / Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Raperkada), Rabu (05/02) bertempat di Balai Pertemuan BerAkhlaq.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH) Kanwil Kemenkum Kalsel, Anton Edward Wardhana, menyambut baik kedatangan jajaran Pemkab Balangan. Ia menegaskan komitmennya untuk memberikan pelayanan terbaik dalam proses harmonisasi Raperda guna memastikan kesesuaian dengan regulasi yang berlaku.

“Kami siap mendukung dan memberikan layanan terbaik dalam proses harmonisasi Raperda. Hal ini penting agar produk hukum yang dihasilkan dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat,” Anton Edward Wardhana.

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Balangan, Muhammad Roji, menyampaikan bahwa kunjungan tersebut bertujuan untuk melanjutkan sinergi dalam proses harmonisasi Raperda.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang telah terjalin. Ke depannya, kami berharap hubungan ini dapat terus ditingkatkan demi perbaikan regulasi di Kabupaten Balangan, baik dalam bentuk Perda maupun Peraturan Bupati,” tutur Muhammad Roji.

Ia menambahkan bahwa melalui harmonisasi dengan Kanwil Kemenkum Kalsel, produk hukum di Kabupaten Balangan dapat lebih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga memberikan kepastian dan manfaat bagi masyarakat. (Humas Kanwil Kalsel, Iwan, Ed : Eko).



Kanwil Kemenkum Kalsel dan Pemkab Barito Kuala Perkuat Sinergi dalam Harmonisasi Raperda



Banjarmasin, Humas_ Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) menerima audiensi dari jajaran Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam rangka proses harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), Rabu (05/02). Pertemuan ini berlangsung di Balai Pertemuan BerAkhlahk dan menjadi bagian dari upaya memastikan regulasi daerah sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH) Kanwil Kemenkum Kalsel, Anton Edward Wardhana, menyambut baik kunjungan tersebut. Dalam sambutannya, Anton menegaskan komitmen Kanwil Kemenkum Kalsel dalam memberikan pelayanan terbaik dalam proses harmonisasi Raperda. Ia menekankan pentingnya proses ini guna memastikan setiap regulasi yang dirancang oleh pemerintah daerah tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku secara nasional.

“Kami siap mendukung penuh dalam proses harmonisasi Raperda yang diajukan oleh Pemkab Barito Kuala. Harmonisasi ini bertujuan untuk memastikan aturan yang dibuat selaras dengan peraturan yang lebih tinggi, sehingga dapat diterapkan dengan efektif dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” ujar Anton.

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Barito Kuala, Metty Monita, menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan Kanwil Kemenkum Kalsel. Menurutnya, harmonisasi Raperda sangat penting dalam menciptakan regulasi yang tidak hanya sesuai dengan hukum yang berlaku, tetapi juga memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

“Kami berterima kasih atas sambutan dan dukungan dari Kanwil Kemenkum Kalsel. Proses harmonisasi ini menjadi bagian dari upaya kami untuk memastikan setiap Raperda yang diajukan dapat diterapkan secara efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Barito Kuala,” ujar Metty. (Humas Kanwil Kalsel, Iwan, Ed : Eko).



Kakanwil Kemenkum Kalsel Dorong UMKM Lokal, Perkuat Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual



Kandangan, KI_Info – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kakanwil Kemenkum Kalsel), Nuryanti Widyastuti, melakukan kunjungan kerja ke Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS). Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dalam pengembangan serta perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi para pelaku UMKM dan pengrajin lokal.

Dalam kesempatan tersebut, Nuryanti Widyastuti menekankan pentingnya pendaftaran HKI sebagai bentuk perlindungan atas karya dan inovasi yang dihasilkan oleh pengrajin daerah. Menurutnya, pemahaman dan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya HKI dapat meningkatkan daya saing produk lokal serta mencegah penyalahgunaan atau klaim dari pihak lain.

"Kita ingin memastikan bahwa setiap produk kerajinan lokal yang memiliki nilai seni dan budaya tinggi mendapatkan perlindungan hukum yang layak. Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual bukan hanya memberikan perlindungan, tetapi juga dapat menjadi nilai tambah bagi produk tersebut di pasar nasional maupun internasional," ujar Nuryanti Widyastuti.

Lebih lanjut, ia juga mengajak Dekranasda dan para pelaku UMKM untuk lebih aktif dalam memahami prosedur pendaftaran HKI serta manfaat jangka panjangnya bagi keberlanjutan usaha.

Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara Kemenkumham Kalsel dan Dekranasda Hulu Sungai Selatan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal serta memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi para pengrajin daerah. (Humas Kemenkum Kalsel, kontributor: Bidang KI, ed: Eko, Dicky)



Kanwil Kemenkum Kalsel Dorong Optimalisasi Perlindungan KI di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Melalui Pembinaan Strategis



Hulu Sungai Selatan, KI_Info – Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyelenggarakan kegiatan “Pembinaan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Desain Industri, dan KI Komunal)” pada Rabu (05/02) dengan menghadirkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan sebagai narasumber. Acara dibuka oleh Sekretaris Bappelitbangda, Rina Juleli, yang dalam sambutannya menyampaikan pentingnya peningkatan kapasitas pelaku usaha, pengrajin, pemangku adat, dan inovator lokal dalam memahami dan melindungi kekayaan intelektual (KI).

“Ini adalah langkah strategis untuk mengoptimalkan potensi lokal sekaligus melindungi aset budaya dan ekonomi daerah,” ujarnya.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Nuryanti Widyastuti, dalam paparannya menekankan komitmen kementerian dalam mendukung perlindungan KI. Beliau menyoroti pentingnya sinergi antarinstansi untuk melindungi warisan budaya seperti seni ukir Banjar, tenun sasirangan, dan produk lokal lainnya.

“Perlindungan KI bukan hanya soal hukum, tetapi juga upaya menjaga identitas dan meningkatkan daya saing ekonomi,” tegasnya.

Nuryanti juga mengungkapkan tiga fokus utama Kemenkum Kalsel: penguatan literasi KI, fasilitasi pendaftaran KI, dan pengelolaan KI Komunal berbasis kolaborasi desa/adat.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Kalsel, Meidy Firmansyah, memaparkan program unggulan 2025, termasuk Mobile IP Clinic dan Jelajah KI, yang dirancang untuk menjangkau daerah terpencil dan komunitas kreatif. Sementara itu, Kepala Bidang Kekayaan Intelektual, Riswandi, menjelaskan secara rinci mekanisme perlindungan Hak Cipta, Desain Industri, dan KI Komunal. Acara diakhiri dengan komitmen bersama untuk menyusun rencana aksi pendampingan teknis dan sosialisasi KI kepada pelaku UMKM di Hulu Sungai Selatan. (Humas Kanwil Kalsel, teks dan foto : Kontributor Bidang KI ed : Eko/Mahdian)





Sosialisasi Perdana IP Clinic: Kanwil Kemenkum Kalsel Dorong Perlindungan Kekayaan Intelektual di Kabupaten HSS

Kandangan, KI_Info - Pada (05/02/2025), Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Kalimantan Selatan melaksanakan Klinik Kekayaan Intelektual Bergerak yang pertama di tahun 2025 dengan mengunjungi Mall Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS). Kunjungan ini dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Nuryanti Widyastuti, bersama rombongan yang terdiri dari Kepala Divisi Pelayanan Hukum Meidy Firmansyah, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (KI) Riswandi, serta Tim Layanan KI.

Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dalam optimalisasi layanan publik, khususnya di bidang hukum dan perlindungan kekayaan intelektual. Nuryanti Widyastuti menekankan pentingnya integrasi layanan hukum dan KI di MPP untuk memudahkan akses masyarakat. "Kolaborasi antar instansi menjadi kunci dalam menyederhanakan prosedur dan meningkatkan kualitas pelayanan," ujarnya.

Rombongan juga meninjau fasilitas MPP dan berdialog dengan petugas layanan untuk mengevaluasi kebutuhan serta tantangan teknis yang dihadapi di lapangan. M. Afif Bizri, Kabid Litbang Bappelitbangda Kabupaten HSS, mengapresiasi inisiatif Kemenkum Kalsel dalam mendorong inovasi pelayanan publik. Ia menyatakan komitmen Bappelitbangda HSS untuk mendukung program sinergis ini melalui peningkatan kapasitas SDM dan infrastruktur teknologi.

Kegiatan ini ditutup dengan penyusunan rencana aksi bersama, termasuk pelatihan terpadu bagi tenaga layanan dan sosialisasi hak kekayaan intelektual kepada pelaku UMKM di wilayah HSS. (Kontributor, ed: Eko/Arie)



Kanwil Kemenkum Kalsel Gelar Rapat Efisiensi Anggaran, Pastikan Pelayanan Hukum Tetap Optimal



Banjarmasin, Humas_ Info – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti, menggelar rapat efisiensi anggaran pada Kamis (6/2/2025) di Ruang Kerja Kakanwil Kemenkum Kalsel. Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti strategi efisiensi anggaran di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalsel agar tetap selaras dengan prinsip tata kelola keuangan yang baik.

Dalam rapat tersebut, turut hadir sejumlah pejabat, antara lain Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah, Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha, Rustam Sakka serta Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Dewi Woro Lestari dan Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Riswandi. Pada kesempatan ini Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha memaparkan rancangan efisiensi anggaran yang melibatkan penghapusan anggaran di sektor Barang Milik Negara (BMN), alat tulis kantor (ATK), serta penyewaan kendaraan dinas. Selain itu, dilakukan pemangkasan pada anggaran kehumasan, perjalanan dinas, dan kegiatan seremonial.



Meski demikian, anggaran untuk gaji, tunjangan pegawai, dan outsourcing tetap dipertahankan tanpa pemangkasan. Hal ini menunjukkan komitmen Kanwil Kemenkum Kalsel dalam menjaga kesejahteraan pegawai serta memastikan operasional kantor tetap berjalan dengan baik.

Kakanwil Kemenkum Kalsel, Nuryanti Widyastuti, menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh menghambat pelayanan hukum kepada masyarakat.

“Meskipun ada penyesuaian anggaran, pelayanan hukum tetap harus berjalan optimal. Kita harus tetap profesional dalam memberikan layanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Dengan langkah ini, diharapkan efisiensi anggaran dapat berjalan efektif tanpa mengurangi kualitas pelayanan di Kanwil Kemenkum Kalsel. (Humas Kanwil Kemenkum Kalsel, Teks: Dicky Joel, Foto: Dicky, Ed: Eko)



Lantik Notaris Pengganti Kabupaten Banjar, Kadiv Pelayanan Hukum Tekankan Pentingnya Penerapan PMPJ



Banjarmasin, AHU_Info – Kepala Divisi Pelayanan Hukum (Kadiv Yankum) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Meidy Firmansyah melantik Edy Purnomo sebagai Notaris Pengganti di Kabupaten Banjar pada Kamis, (06/02), di Balai Pertemuan Garuda Kanwil Kemenkum Kalsel didasarkan pada keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kabupaten Banjar. Dalam kesempatan ini, Meidy Firmansyah menekankan pentingnya pemahaman dan penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) oleh seluruh Notaris.

PMPJ merupakan bagian dari upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang harus diterapkan secara ketat dalam setiap layanan kenotariatan.

“pengangkatan Notaris Pengganti merupakan bentuk kepastian hukum serta mengingatkan bahwa Notaris Pengganti memiliki tanggung jawab yang sama dengan Notaris yang digantikan,” sebut Kadiv Yankum.

Meidy juga mengingatkan bahwa penerapan PMPJ mencakup transaksi seperti pembelian dan penjualan properti, pengelolaan dana atau produk jasa keuangan lainnya, pengelolaan rekening giro, tabungan, deposito, rekening efek, serta pengelolaan perusahaan dan penjualan badan hukum. Dengan memahami prinsip ini, notaris dapat berperan aktif dalam menjaga integritas sistem hukum serta mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana ekonomi. (Humas Kanwil Kalsel | teks dan foto : Mahdian | ed : Eko)



Exit Meeting Audit Pengadaan Konstruksi: Komitmen Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Selatan terhadap Kepatuhan Regulasi



Banjarmasin, Humas_ Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan bersama dengan Tim Inspektorat Wilayah V melaksanakan kegiatan Exit Meeting Audit Ketaatan atas Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi pada Kamis (06/02) di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari audit yang telah dilakukan selama lima hari sejak 3 hingga 7 Februari 2025. Exit meeting ini bertujuan untuk menyampaikan hasil audit serta rekomendasi yang harus ditindaklanjuti guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi dalam proses pengadaan barang dan jasa konstruksi.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum sebagai perwakilan Kantor Wilayah, Anton Edward Wardhana, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Rustam Sakka, serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Gedung Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan TA. 2024, Sugito. Turut hadir pula Tim Pengelola Administrasi Pembangunan Gedung, Ahmad Zubaidi, beserta Tim Pendukung PPK Pembangunan Gedung Kantor Wilayah.

Amrizal, Inspektur Wilayah V sekaligus sebagai Penanggung Jawab Tim Audit, menyampaikan hasil audit yang mencakup beberapa rekomendasi terkait ketaatan dalam pengadaan barang dan jasa konstruksi. Penilaian audit yang dilakukan mencakup evaluasi terhadap kecukupan Sistem Pengendalian Intern, identifikasi dan mitigasi risiko ketidaktaatan, serta penilaian desain pengendalian yang telah diterapkan. Dengan adanya exit meeting ini, diharapkan pengelolaan pengadaan barang dan jasa konstruksi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan semakin transparan dan akuntabel.

Menanggapi rekomendasi yang diberikan, Sugito menegaskan bahwa hasil audit akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Secepatnya akan kami tindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan prosedur yang berlaku, serta regulasi terkait dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa konstruksi TA 2024,” ujarnya. (Humas Kemenkum Kalsel, foto dan teks : Pendi, ed : Eko)





Sinergi Kanwil Kemenkum Kalsel dan Pemkab Tabalong, Optimalkan Harmonisasi Raperda

Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menerima kunjungan dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong, Kamis (06/02). Kunjungan tersebut bertujuan untuk menindaklanjuti proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) serta satu Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup).

Dalam audiensi ini, perwakilan dari Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabalong, Analis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Muhammad Fiqreza Arham, diterima langsung oleh Bahjatul Mardhiah, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kantor Wilayah.

Pertemuan ini membahas dua Raperda yang sedang dalam proses harmonisasi, yaitu Raperda tentang Bangunan Gedung dan Raperda tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak. Kedua rancangan tersebut telah mengalami perbaikan baik dari segi substansi maupun teknis. Selain itu, konsep regulasi ini telah memperoleh paraf persetujuan dari pejabat pemrakarsa serta bagian hukum, yang menjadi salah satu syarat dalam penerbitan surat selesai harmonisasi oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel.

Dalam kesempatan yang sama, juga diajukan permohonan harmonisasi terhadap Ranperbup Tabalong tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tanta. Tim pengharmonisasian dari Kanwil Kemenkum Kalsel akan segera melakukan analisis terhadap konsep regulasi ini dan menjadwalkan rapat pembahasannya dalam waktu dekat.

Kanwil Kemenkum Kalsel terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, khususnya dalam bidang harmonisasi peraturan perundang-undangan. Dengan adanya kerja sama yang baik antara Kanwil Kemenkum Kalsel dan Pemerintah Kabupaten Tabalong, diharapkan regulasi yang dihasilkan dapat lebih komprehensif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (Kontributor Divisi PPPH/Nizar, Ed : Iwan/Eko)



Kanwil Kemenkum Kalsel Ikuti OPLET, Samakan Persepsi Penilaian Kompetensi Menuju Indonesia Emas 2045



Banjarmasin, Humas_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti kegiatan Obrolan Penilaian Kompetensi Edisi Terkini (OPLET) yang diselenggarakan oleh Pusat Penilaian Kompetensi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum (BPSDM Kemenkum) pada Jumat, (07/02). Kegiatan ini mengangkat tema “Sosialisasi Penilaian Kompetensi dan Tindak Lanjut Pemanfaatan Hasil Penilaian Kompetensi melalui OPLET” dan dilaksanakan secara hybrid (luring dan daring).

Kegiatan ini diikuti secara daring dari Kepala Kantor Wilayah, Nuryanti Widyastuti, Kepala Divisi P3H, Anton Edward Wardhana, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah serta seluruh pegawai secara mandiri karena tengah menerapkan Pola Kerja Fleksibel (Work From Home/WFH).

OPLET bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam penyelenggaraan Penilaian Kompetensi di lingkungan Kementerian Hukum, sehingga hasil penilaian nantinya dapat dijadikan dasar dalam pembinaan kepegawaian serta perencanaan pengembangan kompetensi pegawai.

Kegiatan dibuka oleh Kepala BPSDM Kemenkum, Gusti Ayu Putri Suwardani, yang mengungkapkan bahwa Penilaian Kompetensi merupakan proses membandingkan kompetensi yang dimiliki PNS dengan kompetensi jabatan yang dipersyaratkan melalui metode Assessment Center atau metode lainnya. Kompetensi yang dinilai meliputi Teknis, Manajerial, dan Sosial Kultural.

Kegiatan ini turut menghadirkan narasumber dari berbagai instansi, yakni Deputy Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN BKN RI, Herman; Kepala Biro SDM Sekretariat Jenderal Kemenkum, Fajar Sulaeman Taman; serta Assessor SDM Aparatur Ahli Utama, Iwan Kurniawan.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti, menyambut baik penyelenggaraan OPLET sebagai upaya meningkatkan kualitas SDM aparatur di lingkungan Kemenkum.

“Kami berharap kegiatan ini dapat memperkuat pemahaman pegawai mengenai pentingnya penilaian kompetensi sebagai dasar dalam pengembangan karier dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujarnya. (Humas Kanwil Kalsel | teks dan foto : Mahdian | ed : Eko)





**KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN**



**PASTI
BERGERAK**

